



Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 di Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri

Yuliana Siti Hamidah¹, Nur Rahmanti Ratih², Miladiah Kusumaningarti³

^{1,2,3} Program Sarjana Akuntansi Universitas Islam Kediri

Abstract

Received: 01 Mei 2024

Revised: 08 Mei 2024

Accepted: 15 Mei 2024

The village financial system (SISKEUDES) provides space for village government agencies to obtain wider information and encourages them to play a role in conveying information. This system will make it easier for village governments to prepare village programs. With the increasingly difficult and complex tasks of village governments occurring in villages, information and communication systems support villages in implementing governance that produces transparent and accountable financial reports. The aim of this research is to find out the results of the analysis of the implementation of the village financial system (SISKEUDES) on the quality of financial reports in Tales Village, Ngadiluwih District, Kediri Regency. This research was conducted in Tales Village, Ngadiluwih District, Kediri Regency using primary data. The data analysis technique is qualitative data analysis. Based on the results of the analysis, it was found that accountability and transparency in the management of village financial reports in Tales Village used stages in accordance with the regulations of PERMENDAGRI no. 20 of 2018 starting from planning and budgeting, implementation, administration, reporting and accountability so that Tales Village can produce good quality financial reports and in accordance with applicable regulatory standards

Keywords: SISKEUDES, Financial Reports.

(*) Corresponding Author: yuliana95851@gmail.com

How to Cite: Hamidah, Y. S., Ratih, N. R., & Kusumaningarti, M. (2024). Analisis Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 di Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11519607>.

PENDAHULUAN

Pemerintah desa diharapkan Otonomi daerah memberi peluang dan kesempatan kepada daerah untuk mengurus daerahnya sendiri secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel. Salah satu tujuan otonomi daerah untuk memberdayakan masyarakat setempat dalam menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tentram dan memperluas pilihan yang dapat dilakukan masyarakat (BPKP, 2015).

Keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mencakup seluruh hak dan kewajiban milik desa yang mempunyai nilai moneter serta segala aset (termasuk uang dan harta benda berwujud) yang digunakan untuk melaksanakan hak dan kewajiban tersebut. Pemerintah desa wajib membuat dua jenis laporan terkait keuangan desa, yaitu Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dan Laporan Realisasi



Pelaksanaan APBDes. Laporan-laporan tersebut dibuat dalam parameter siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai pada tahap perencanaan dan penganggaran, dilanjutkan pada tahap pelaksanaan dan penatausahaan, dan diakhiri pada tahap evaluasi. (BPKP, 2015).

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengembangkan aplikasi sistem keuangan desa dengan tujuan untuk meningkatkan standar tata kelola keuangan di tingkat desa. Banyak kota yang menggunakan Microsoft Excel atau program lain tanpa format yang konsisten untuk menyiapkan anggaran, catatan, dan laporan keuangan sebelum SISKEUDES diperkenalkan. Hal ini menyebabkan pemerintah kabupaten/kota kesulitan menganalisis APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan laporan keuangan berbagai desa. Selain itu, banyak desa yang menggunakan perangkat lunak yang dibuat oleh pengembang swasta yang tidak dapat diperbarui sesuai dengan persyaratan hukum yang relevan (BPKP, 2015)

Hal ini juga meningkatkan potensi penyelewengan dana yang cukup tinggi. Menghadapi masalah ini, pemerintah bekerja sama dengan Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) menciptakan sebuah aplikasi keuangan desa. Tujuannya adalah untuk membantu perangkat desa dalam melaporkan keuangan mereka sehingga mereka dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan bermutu melalui aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES).

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) memberikan kesempatan kepada lembaga pemerintah desa untuk memperoleh lebih banyak informasi dan memotivasi mereka untuk aktif menyebarkannya. Pembuatan program desa akan dipermudah oleh pemerintah desa dengan metode ini. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi instrumen penting dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan akuntabel, terutama dalam hal pengawasan sistem keuangan desa, seiring dengan semakin rumitnya aktivitas pemerintahan desa.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Sektor Publik

Menurut Widilestariningsih & Permana (2017) menyatakan bahwa : Akuntansi sektor publik adalah suatu proses yang melibatkan pengumpulan, pencatatan, klarifikasi, analisis, dan pelaporan transaksi keuangan dalam sebuah entitas publik. Tujuan dari proses ini adalah untuk menyediakan informasi keuangan yang dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

Desa

Menurut UU No. 6 Tentang Desa (2014) menyatakan bahwa:

Desa, yang sering disebut desa adat atau dengan nama lain, adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu. Desa ini mempunyai kekuasaan untuk mengendalikan dan mengawasi baik urusan pemerintahan daerah maupun kepentingan masyarakat. Pengaturan ini dilandasi atas prakarsa masyarakat, hak leluhur, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dilindungi dalam struktur politik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, desa diakui sebagai bagian penting dalam struktur pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan berhak mendapat penugasan atau pelimpahan tugas dari pemerintah pusat atau daerah untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Nilai-nilai yang menjadi pedoman pemerintahan desa adalah inklusivitas, keberagaman, nyata.

Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES)

Pengembangan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dimulai sebagai antisipasi disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perencanaan ini bertepatan dengan peningkatan fokus dari Komisi Pemberantasan Korupsi dan Komisi XI DPR RI. Permasalahan Kemendagri dan Komisi Desa terjawab dengan dirilisnya aplikasi ini pada 13 Juli 2015. Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat pertama kali membuat aplikasi pengelolaan keuangan desa ini sebagai percobaan pada bulan Mei 2015.

Laporan Keuangan

Menurut Suteja (2018) menyatakan bahwa: Laporan keuangan adalah dokumen yang mencerminkan kondisi keuangan hasil dari aktivitas akuntansi selama periode tertentu dan berfungsi sebagai sarana komunikasi kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, yang merupakan salah satu jenis pendekatan deskriptif. Dalam metode ini, penelitian dilakukan secara mendalam dan terperinci terhadap suatu entitas, lembaga, atau gejala tertentu dengan fokus pada area atau subjek yang sangat terbatas. Penelitian ini bersifat kualitatif, yang berarti peneliti berusaha untuk memahami kebenaran-kebenaran yang terkandung dalam fenomena yang diteliti. Dalam pendekatan kualitatif, penelitian dilakukan dengan menggambarkan fenomena dengan kata-kata atau kalimat, mengkategorikan data, dan mencapai kesimpulan berdasarkan analisis data.

Data dan Teknik Pengumpulannya

Data

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari data primer, yaitu kata-kata lisan atau lisan yang diucapkan, gerak-gerik, atau tingkah laku subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini subjek penelitian (informasi) yang berkaitan dengan variabel yang diteliti (Cholid Narbuko, 2015).

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dengan pendekatan open-ended. Pendekatan ini dipilih agar para informan dapat secara luas mengungkapkan informasi yang mereka miliki dan pahami.

2. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai pendukung data yang diperoleh dari wawancara. Dengan adanya dokumen, hasil wawancara menjadi lebih kredibel. Dalam penelitian ini, dokumen-dokumen yang relevan dengan Siskeudes dijadikan sebagai validasi terhadap informasi yang diperoleh dari wawancara.

Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu konsep yang digunakan untuk memberikan kerangka kerja pengukuran dalam penelitian guna mengubah variabel yang bersifat abstrak menjadi variabel yang dapat diukur secara konkret. Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang digunakan untuk pengukuran didasarkan pada teori yang telah ada yaitu aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) terhadap laporan keuangan desa. Secara operasional variabel - variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Definisi Operasional

Variabel	Indikator	Item	No. Butir wawancara	Literatur
SISKEUDES (X1)	Perencanaan dan penganggaran	SISKEUDES pada tahap perencanaan dan penganggaran mampu memberikan keselarasan dalam RPJM dan RKP desa dengan program pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.	1	BPKP (2015)
	Pelaksanaan	SISKEUDES memfasilitasi pembelian barang dan jasa serta kepatuhan pembayaran kewajiban perpajakan sesuai APBDES pada tahap pelaksanaan.	2	
	Penatausahaan	SISKEUDES Memiliki kemampuan untuk menambahkan dokumentasi transaksi (seperti catatan, faktur, kwitansi, dll) dalam laporan keuangan sepanjang tahap administrasi sebagai sarana pelaksanaan tugas.	3	
	Pelaporan	SISKEUDES pada tahap pelaporan sudah sesuai dengan permendagri.	4	
	Pertanggungjawaban	SISKEUDES pada tahap pertanggungjawaban mampu memberikan laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.	5	

Sumber : Data Diolah, 2023

Laporan Keuangan Desa (Y)	Dapat Dibandingkan & dapat di pahami	SISKEUDES adalah sistem yang termuat dalam laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan keuangan pemerintah lainnya dengan syarat menetapkan kebijakan yang sama.	6	Mahfud sholihin (2017)
	Andal & relevan	SISKEUDES adalah Sistem pelaporan keuangan pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada informasi yang menyesatkan dan kesalahan material dalam laporan tersebut. Laporan tersebut harus mempresentasikan semua fakta dengan jujur, dapat diverifikasi, dan harus netral.	7	
	Akuntabilitas	SISKEUDES adalah sistem yang dapat menghasilkan laporan keuangan yang menampilkan suatu kondisi yang sebenarnya tanpa ada yang di tutup-tutupi berisi suatu informasi. Dengan melakukan pencatatan terhadap semua transaksi akan lebih mudah pertanggungjawaban dan dengan menggunakan prinsip syariah.	8	Rizal Djalil (2014)
	Transparansi	SISKEUDES adalah sistem yang menawarkan data keuangan yang transparan, akuntabilitas yang cepat, informasi yang lugas dan mudah tersedia bagi publik, serta mempertimbangkan hak masyarakat untuk mengetahui segala hal yang perlu diketahui tentang transparansi pemerintah.	9	Mardiasmo (2006)

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah analisis data kualitatif yang mana metode untuk pengolahan data yang dihasilkan menjadi sebuah informasi yang dapat bermanfaat untuk menemukan solusi dari sebuah permasalahan. Penelitian dilaksanakan dengan metode deskriptif kuantitatif ini dengan analisis dilakukan secara deskriptif. Prosesnya dari mengorganisir hasil wawancara, menganalisis dan menginterpretasikannya menjadi sebuah informasi. Teknik analisis yang optimal dalam menganalisis data adalah menggabungkan prosedur umum dengan langkah-langkah khusus. Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UU PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2018. Teknik analisis data adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi penerapan sistem keuangan desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri,
2. Menggali data-data dan informasi kepada operator keuangan desa terkait data yang dibutuhkan dalam pengelolaan keuangan desa dengan pedoman PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018,
3. Mengolah data sesuai dengan hasil wawancara dengan operator keuangan desa digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

4. Membuat kesimpulan dari hasil implementasi untuk mengevaluasi apakah pengelolaan keuangan desa yang didasarkan pada aplikasi sistem keuangan desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) di Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri

Pada tahun 2016 diterapkan SISKEUDES, sistem keuangan desa offline, di Desa Tales, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Setelah itu, Tales Village bermigrasi ke platform online pada tahun 2018. SISKEUDES dioperasikan oleh Ibu Ulfatur Rohmah yang menjabat sebagai Financial Operator. Temuan penelitian ini mengungkapkan variasi penting antara dua kali penggunaan SISKEUDES. Sebelumnya, Pemerintah Desa Tales mengelola keuangan desa secara manual dengan menggunakan Microsoft Excel sebagai alatnya..

Pemerintahan Desa Tales menggunakan Microsoft Excel dalam pengelolaan keuangan desa, namun memerlukan waktu yang cukup lama karena setiap informasi harus diinput secara manual. Namun SISKEUDES membuat pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efektif karena waktu yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Hanya data yang telah divalidasi keakuratannya yang boleh dimasukkan selama pengelolaan. Operator hanya perlu mencetak laporan yang diperlukan jika terjadi pemeriksaan yang tidak terduga. Untuk menghindari kesalahan input data, operator harus konsisten dan berhati-hati dalam memasukkan data dan membuat laporan keuangan.

BAB 1 Kualitas Laporan Keuangan Desa di Desa Tales Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri

BAB 2 Peneliti yang mempelajari pengelolaan keuangan desa menggunakan data PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018 untuk membuat analisis yang melalui beberapa tahapan. yaitu:

1. Tahap Perencanaan dan Tahap Penganggaran

BAB 3 Tahap perencanaan dan penganggaran merupakan langkah awal dalam proses perencanaan pertumbuhan Desa. Strategi penggunaan anggaran Desa harus disiapkan pada tahap ini, sehingga memerlukan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Terlaksananya pembahasan di Desa untuk menetapkan prioritas pembangunan menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Tales menangani tahap perencanaan dengan baik.

BAB 4 Penyusunan RKP Desa yang sebelumnya melibatkan Musyawarah Desa (Musdes) untuk membahas arah dan prioritas pembangunan Desa selama 6 tahun serta pembiayaan kegiatan pembangunan dan pelaksanaannya, mengawali proses perencanaan anggaran Desa di Desa Tales. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) disusun berdasarkan konsensus yang dicapai dalam perdebatan desa.

BAB 5 Untuk membahas dan menyetujui rancangan RPJMDes serta menetapkan prioritas kebutuhan dan kegiatan desa, kepala desa kemudian menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang). Hal ini menjadi landasan penyusunan RKPDes atau Rencana Kerja Pembangunan Desa yang kemudian diumumkan ke publik. RKPDes yang telah disusun menjadi landasan penghitungan APBDes, namun Sekretaris Desa terlebih dahulu membuat rancangannya.

BAB 6 Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kemudian mengesahkan peraturan APBDes. Camat kemudian menyampaikan Peraturan Desa tersebut kepada bupati untuk menjamin terlaksananya program atau kegiatan tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menguraikan jenis program atau kegiatan, serta besaran anggaran yang akan digunakan. Pemerintah Desa akan melaksanakan program dan kegiatan tersebut sesuai dengan pedoman ini. Kepala Desa akan menilai kesimpulan APBDes dalam peraturan Desa dan kemudian menindaklanjuti temuan evaluasi tersebut. Tahap terakhir dalam proses perencanaan adalah menetapkan APBDes sesuai dengan undang-undang Desa.

BAB 7 Melalui analisis berdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa perencanaan di Desa Tales telah dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan aturan yang dituangkan dalam PERMENDAGRI nomor 20 tahun 2018. Turut serta dalam penyusunan RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDes bersama masyarakat memperkuat akuntabilitas dan keterbukaan di seluruh tahap perencanaan ini. Walaupun ada kendala seperti ketidakhadiran beberapa lembaga Desa dalam MUSDES, ini tidak menghambat proses perencanaan pembangunan Desa. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Tales dapat mempertimbangkan untuk lebih tegas terhadap lembaga Desa agar proses perencanaan berjalan lebih lancar.

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan dalam pengelolaan anggaran Desa adalah tahap di mana rencana yang telah ditetapkan dalam APBDes direalisasikan. Di Desa Tales, pelaksanaan ini dimulai setelah penerapan APBDes dan telah diatur mengenai Rencana Anggaran Belanja (RAB). Bendahara desa menekankan pentingnya mendokumentasikan seluruh penerimaan dan pengeluaran dengan bukti transaksi. Bukti transaksi ini berfungsi sebagai catatan pendukung yang merinci transaksi yang dilakukan setelah selesainya tugas untuk alasan pencatatan keuangan. Keterangan pihak yang melakukan transaksi atau pencairan dana paling sedikit harus dicantumkan dalam bukti transaksi.

Penerapan pengelolaan keuangan di Desa Tales telah berjalan dengan baik berdasarkan hasil-hasil yang telah disebutkan di atas. Sebab, setiap tindakan yang dilakukan oleh perangkat Desa harus dituangkan dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SPP) yang harus disampaikan disertai dengan laporan pertanggungjawaban yang sah dan bukti transaksi. Sekretaris Desa memeriksa kembali rencana kegiatan untuk memastikan kesesuaiannya dengan program atau kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, termasuk jenis program atau kegiatan dan besaran anggaran yang akan digunakan. Hal ini dilakukan sebelum pencairan dilakukan.

Penilaian Peraturan Desa terhadap APBDes menjadi pedoman. Tidak dapat diterima apabila kegiatan tersebut tidak ditentukan atau tidak sesuai dengan

anggaran tahun ini, sekalipun ditandatangani oleh keempat pihak yang disebutkan namanya, maka dianggap tidak sah. Seluruh kegiatan Desa yang tertuang dalam RKPDes didukung oleh berbagai sumber pendapatan Desa, antara lain pendapatan asli Desa dan masukan pendapatan transfer ke dalam sistem SISKEUDES di Desa Tales. Penerapan ini menunjukkan akuntabilitas dan transparansi. Hal ini memungkinkan pengawasan yang lebih menyeluruh untuk memastikan bahwa dana hanya dibelanjakan untuk kegiatan yang dijadwalkan pada tahun tersebut.

Faktor eksternal seperti cuaca dapat mempengaruhi kegiatan fisik, hal ini dapat diatasi dengan pencairan anggaran pada bulan-bulan tertentu yang tidak terpengaruh oleh cuaca. Selain itu, kurangnya tenaga ahli di bidang tertentu dapat diatasi dengan menggandeng tenaga ahli dari luar Desa, sehingga proses pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar sesuai dengan RAB yang telah dibuat.

3. Tahap Penatausahaan

Proses pendokumentasian transaksi keuangan yang terjadi di Desa Tales selama satu tahun anggaran merupakan bagian dari tahap administrasi yang ditangani oleh bendahara Desa. Pemerintah mempunyai kendali atas pelaksanaan APBDes. Transaksi uang dicatat secara berkala, dimulai pada saat terjadinya transaksi dan berakhir pada setiap akhir bulan. SISKEUDES digunakan untuk administrasi di Desa Tales. Data tersebut mula-mula dibuat oleh bagian keuangan, dikonfirmasi oleh Sekretaris Desa, kemudian dilaporkan kepada Kepala Desa sebelum dicatat ke dalam sistem oleh SISKEUDES.

Dari temuan di atas dapat disimpulkan bahwa penerapan SISKEUDES membantu dalam memperlancar prosedur administrasi. Setiap transaksi pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama proses administrasi disimpan dalam database. Oleh karena itu, sebelum data dimasukkan oleh operator Desa ke dalam SISKEUDES, harus sangat hati-hati karena data yang sudah dimasukkan tidak dapat diubah. Sebelum laporan disampaikan kepada Kepala Desa, rekaman yang dibuat oleh operator sebelum dimasukkan ke dalam SISKEUDES perlu diperiksa kembali untuk memastikan bukti dan laporan tersebut lengkap dan sesuai dengan apa yang terjadi.

Pengendalian penggunaan dan penerimaan dana merupakan bagian dari akuntabilitas dan transparansi pemerintahan Desa Tales yang menggunakan SISKEUDES. Bendahara yang bertugas mengawasi dan memelihara keuangan Desa Tales mencatat seluruh transaksi di SISKEUDES yang selanjutnya digunakan untuk proses pertanggungjawaban. Ketersediaan SISKEUDES memudahkan pemasukan data bagi operator Desa, namun terkadang muncul kendala seperti salah menaruh kuitansi atau bukti transaksi lainnya. Kesulitan lainnya termasuk kurangnya dokumentasi dan kelemahan sistem termasuk kegagalan dan masalah konektivitas WiFi. Pemerintah Desa Tales khususnya Tim Pengelola Keuangan (TPK) harus memastikan kuitansi pembelian atau bukti transaksi lainnya segera diserahkan guna mengatasi permasalahan tersebut.

4. Tahap Pelaporan

Tahap pelaporan berfungsi untuk memeriksa seberapa baik aparat Desa Tales dalam menangani keuangan desa. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaporan ini kepada Bupati/Walikota melalui camat berupa laporan semester I yang wajib disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan

semester akhir yang harus diserahkan. disampaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. Laporan pelaporan ini memuat realisasi pelaksanaan APBD Desa. Selain itu, pemberitaan juga merupakan upaya aparat Desa Tales untuk bersikap transparan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Desa Tales. Empat format pelaporan yang digunakan adalah laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semester, dan laporan tahunan.

Temuan pernyataan ini mengarah pada kesimpulan bahwa Desa Tales menggunakan empat format pelaporan yang berbeda: laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semester, dan laporan tahunan. Operator SISKEUDES yang bertugas menyusun laporan ini adalah Bendahara Desa. Di Tales Village, pelaporan dapat dilakukan dengan dua cara berbeda: online melalui SISKEUDES, atau di atas kertas, yang memerlukan bukti catatan transaksi. Laporan-laporan ini kemudian diberikan kepada Kepala Desa, yang kemudian diserahkan kepada Camat, yang pada akhirnya diserahkan kepada Bupati.

Pelaporan Bendahara Desa secara online dan offline menegakkan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pelaporan. Saat data transaksi diinput ke SISKEUDES, laporan tersebut sudah ada. Hal ini meningkatkan kredibilitas laporan yang dihasilkan dan memungkinkan sistem untuk secara otomatis mempublikasikan berbagai jenis laporan yang dibutuhkan bendahara jika diperlukan. Meskipun terkadang kami mengalami masalah seperti masalah VPN, Anda dapat melaporkan hal ini ke organisasi yang sesuai, terutama KOMINFO.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Upaya yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga yang menggunakan dana negara seperti pemerintah Desa Tales dikenal dengan tahap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan yang dihasilkan oleh organisasi-organisasi tersebut dapat dijelaskan dan dipahami oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi mengenai laporan keuangan Desa. Akuntabilitas ini mencakup anggota masyarakat Desa Tales selain pihak kecamatan atau kabupaten. Desa Tales menggunakan media cetak seperti spanduk sebagai bentuk komunikasi terkait pengelolaan keuangan Desa untuk memperjelas realitas pelaksanaan APBD Desa, baik pendapatan, belanja, dan pembiayaan, kepada masyarakat. Selain itu, BPD dan elemen masyarakat lainnya juga dilibatkan dalam proses akuntabilitas.

Adanya manfaat signifikan bagi Perangkat Desa Tales, khususnya Bendahara Desa, dengan dipasangnya SISKEUDES. Dengan menghasilkan berbagai laporan yang dibutuhkan, SISKEUDES menghemat waktu, uang, dan meminimalkan risiko penipuan dan kesalahan. Selain itu, SISKEUDES melakukan standarisasi administrasi dan pelaporan keuangan di seluruh Desa, sehingga memudahkan evaluasi kinerja. Masyarakat luas dan pengguna dapat memahami tugas ini berkat pelaporan keuangan yang seragam.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa SISKEUDES di Desa Tales telah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Operator menghadapi sejumlah tantangan, namun aparat Desa mampu menyampaikan data secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam pengelolaan dana Desa. Pengelolaan keuangan yang efektif juga meningkatkan standar pelaporan, sehingga memberikan manfaat bagi Perangkat Desa Tales dengan menambah integritas dan nilai. Secara

umum, Desa Tales telah menerapkan pengelolaan dan proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pelaporan keuangan Desa Tales selama implementasi SISKEUDES telah akuntabel dan transparan. Hal ini terlihat pada setiap tingkatan, mulai dari perencanaan, eksekusi, administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban, yang semuanya dilakukan sesuai dengan persyaratan pelaporan yang relevan. Meski terdapat beberapa kendala seperti kurangnya tanggung jawab terhadap masyarakat dan transparansi, Tales Village dapat melakukan perbaikan dengan mengembangkan WEBDesa yang dapat diakses pengguna secara online. Masyarakat akan lebih mudah menerima informasi mengenai operasional Desa dari rumah mereka dan semakin percaya pada pemerintahan Desa Tales dengan hanya menggunakan telepon seluler.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini dapat diambil berdasarkan temuan dan pembahasan rumusan masalah yang telah dikaji pada bab sebelumnya.:

Desa Tales mengelola pelaporan keuangannya sesuai dengan langkah-langkah yang dituangkan dalam PERMENDAGRI no. 20 Tahun 2018 tentang akuntabilitas dan transparansi seperti berikut:

1. Penganggaran dan Penatausahaan

Desa Tales memanfaatkan keterlibatan masyarakat untuk menciptakan akuntabilitas dan transparansi dalam tahap perencanaan dan penganggaran sebelum pembuatan RPJM Desa, RKP Desa, dan APBDes. Hal ini menjamin bahwa proyek-proyek pembangunan dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ambisi masyarakat.

2. Pelaksanaan

Melalui penggunaan siskeudes, yang memberikan masukan terhadap program dan kegiatan Desa Tales, akuntabilitas dan transparansi dapat dicapai. Selain itu, penggunaan siskeudes memungkinkan pemantauan penggunaan uang yang lebih efektif, memastikan bahwa penggunaan uang hanya digunakan untuk kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya.

- c. Penatausahaan

Desa Tales menggunakan siskeudes untuk administrasi, sehingga memberikan kendali atas uang masuk dan keluar. Bendahara Desa dapat menginput data transaksi lebih cepat karena lebih mudah.

- d. Pelaporan

Pelaporan Bendahara Desa secara online dan offline merupakan salah satu cara Desa Tales menjaga akuntabilitas dan keterbukaan dalam pelaporan keuangannya. Siskeudes telah menulis tentang pelaporan keuangan, meningkatkan keandalan dan validitas informasi.

- e. Pertanggung jawab

Pada akhir tahun, Kepala Desa Tales melakukan proses pertanggungjawaban. Kepala Desa juga meminta pertanggungjawaban BPD dan warga Desa Tales sekaligus melaporkan keberhasilan pelaksanaan APBDes kepada bupati melalui camat.

Oleh karena itu, Desa Tales dapat dikatakan telah menerapkan keterbukaan dan akuntabilitas dalam seluruh aspek pengelolaan pelaporan keuangannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam PERMENDAGRI no. 20 Tahun 2018. Hal ini menunjukkan bahwa Desa Tales telah mentaati aturan, memastikan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara kompeten, dan menjamin transparan kepada masyarakat.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah saran-saran yang dapat diberikan terkait penerapan siskeudes untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat Desa Tales:

Untuk Perangkat Desa Tales

Pengadaan Akses Internet dan Website Resmi. Perangkat Desa Tales dapat mempertimbangkan untuk mengadakan akses internet yang lebih luas dan mengembangkan website resmi Desa Tales. Ini akan memungkinkan warga Desa Tales dan masyarakat umum untuk mengakses informasi terkait perkembangan Desa Tales secara lebih mudah dan transparan.

Memasang spanduk APBDES di seluruh dusun. Kantor desa tidak harus menjadi satu-satunya tempat pemasangan spanduk APBDes. Ada baiknya jika Pemerintah Desa mempertimbangkan untuk memasang spanduk informasi di setiap dusun di Desa Tales. Masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi mengenai bagaimana keuangan desa dikembangkan dan dikelola.

Untuk Penelitian Selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat melakukan studi lebih mendalam untuk mengkaji secara lebih rinci bagaimana mengintegrasikan Sikeudes mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Kajian yang lebih mendalam terhadap beberapa unsur pengelolaan keuangan Desa dapat dicakup.

Penggunaan Model Penelitian Lain: Untuk memahami dampak penempatan Sikeudes pada laporan keuangan secara lebih menyeluruh, peneliti masa depan dapat memilih untuk menggunakan berbagai model penelitian atau teknik analitik yang lebih terdiversifikasi.

Meningkatkan Cakupan Penelitian: Penelitian di masa depan harus memperluas fokus mereka dengan mengkaji bagaimana sikeudes digunakan di berbagai daerah. Hal ini akan memberikan wawasan lebih lanjut mengenai berbagai cara penerapan teknologi ini.

Menambahkan Indikator Pengukuran: Peneliti selanjutnya mungkin mempertimbangkan untuk menambahkan indikator pengukuran untuk meningkatkan akurasi temuan penelitian.

Saran-saran ini diharapkan dapat membantu Desa Tales dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa serta partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Selain itu, saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang efek dari penerapan teknologi seperti sikeudes pada pengelolaan laporan keuangan Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Arifin, Zainal. (2011). **Penelitian pendidikan : Metode dan paradigma baru. Remaja Rosdakarya**
- Asih, K. G., Made, I., Adiputra, P., Ekonomi, J., & Akuntansi, D. (2022). Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Versi 2.0.3 Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Pada Desa Kalibukbuk, Kec. Buleleng, Bali). In *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha (Vol. 13)*.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga.
- BPKP. (2015). *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Tim penyusun Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
- Cholid Nabuko, Abu Achmadi. (2015). *Metode Penelitian*. Bumi Aksara.
- Djalil, Rizal. (2014). *Akuntabilitas Keuangan Daerah Implementasi Pasca Reformasi*. PT Semesta Rakyat Merdeka
- Dwi Ratmono, Mahfud Sholihin. (2017). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. UPP STIM YKPN.
- Faizah, A., & Sari, R. (2022). *Analisis Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam Pengelolaan Keuangan Di Desa Banyudono Kecamatan Dukun*. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 5(1), 763–776. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i1.539>
- Hanafi, Mahduh M dan Abdul Halim. (2016). *Analisis laporan Keuangan*. YKPN.
- Hery. (2017). *Analisis Laporan Keuangan, Cet. 2*. Grasindo.
- Lukito, Penny, Kusumastut. (2014). *Membumikan Transparansi Dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Demokrasi Ke Depan*. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- LAN dan BPKP. (2015). *Akuntabilitas dan Good Governance, Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. LAN.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo, (2006). *Perwujudan Transparansi Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi*. Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi.
- Martani, Dwi dkk. (2014). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK, Cet. 1*. Salemba Empat.
- Miladiah Kusumaningarti, Dkk. (2022). *Kinerja Keuangan Koperasi Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19 Terhadap Sisa Hasil Usaha*. *JAS : Jurnal Akuntansi Syariah*, 6(2), 184-197. <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/806>
- Munawir. (2014). *Analisa Laporan Keuangan (4th ed.)*. Liberty.
- Nur Rahmanti Ratih. (2021). *Penyajian Laporan Keuangan Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Serta Pengaruhnya Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan*

- Keuangan Daerah. (YUME: Journal Of Management), 4(2).
<https://www.journal.stieamkop.ac.id/index.php/yume/article/view/1339>.
- Nordiawan, Deddi. (2010). *Akuntansi Sektor Publik, Edisi Kedua*. Salemba Empat. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan dan Pembangunan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 68 (1) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Pratiwi, D. N., & Pravasanti, Y. A. (2020). *Analisis Penggunaan Siskeudes dalam Pengelolaan Dana Desa*. Jurnal Akuntansi Dan Pajak, 20(2), 217–223. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i2.770>
- Renyowijoyo, Muindro. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba, Edisi 2*. Mitra Wacana Media.
- Samantha, R., & Almalik, D. (2019). *Evaluasi Pengguna Aplikasi Sistem Keuangan Desa Siskeudes Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Mattunru-Tunrue Kec.Cempa Kab. Pinrang)*. KINERJA Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 4(2), 58–66. [Http://Www.Tjyybjb.Ac.Cn/CN/Article/Downloadarticlefile.Do?Attachtype=PDF&Id=9987](http://Www.Tjyybjb.Ac.Cn/CN/Article/Downloadarticlefile.Do?Attachtype=PDF&Id=9987)
- Sugiyono. (2019). *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV Alfabeta.
- Suteja, I. G. N. (2018). *Analisis Kinerja Keuangan dengan Metode Altman Z-Score Pada PT Ace Hardware Indonesia Tbk. V(1)*. Retrieved from <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/2898/1978>
- Umami, R., Nurodin, I., Universitas,), & Sukabumi, M. (2017). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa* s(Vol. 6).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 1.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 212 Ayat (1).
- Widilestariningsih, O., & Permana, I. (2017). *Implementasi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal Universitas Komputer Indonesia, 65–86.
- Winarno, Slamet Heri. (2017). "Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan Melalui Analisis Rasio Profitabilitas." Jurnal Moneter 6(2):106–12
- Wiratna Sujarweni. (2015). *Akuntansi Desa*. Pustaka Baru.